

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti dapat menarik beberapa kesimpulan mengenai pengelolaan strategi komunikasi dalam upaya P4GN di lingkungan pelajar dan mahasiswa yang dilakukan oleh BNNP DIY. Dalam hal perencanaan, BNNP DIY melakukan proses perencanaan tiga tingkat. Proses tersebut dimulai dari tingkat korporasi (BNN Pusat), instansi vertikal (BNNP DIY), dan tingkat operasional (Bidang-bidang yang ada di BNNP DIY), hingga pada akhirnya dapat diimplementasikan dalam bentuk kegiatan. Pada saat melakukan research untuk perencanaan sendiri, data yang digunakan bersumber dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh BNN Pusat dengan Puslitkes UI dalam kurun waktu lima tahun sekali. Penggunaan data tersebut sebagai dasar dalam melakukan perencanaan tentunya kurang relevan. Hal ini dikarenakan data yang dihasilkan kurang spesifik untuk wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, serta kurang mewakili kondisi teraktual karena hanya dilakukan selama lima tahun sekali. Padahal, tantangan dan permasalahan narkoba yang harus dihadapi setiap tahunnya tentu mengalami perubahan.

Secara umum BNNP DIY memfokuskan upayanya dalam dua hal yakni *supply reduction* dan *demand reduction*. *Supply reduction* dilakukan dengan meningkatkan pelaksanaan operasi pengungkapan jaringan dan menindaknya,

termasuk memberantas produksi dan jaringan narkoba. Sedangkan *demand reduction* dilakukan dengan dua cara yakni merehabilitasi sebanyak mungkin penyalahguna narkoba agar dapat pulih kembali, serta membuat imun (mencegah) masyarakat yang belum terkena pengaruh agar tidak terpengaruh narkoba, baik sebagai pemakai maupun pengedar.

Sedangkan dalam konteks Strategi komunikasi dalam upaya P4GN di lingkungan pelajar dan mahasiswa, BNNP DIY memfokuskan implementasinya dengan cara meningkatkan peran aktif dari para peserta didik untuk membantu upaya pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (*demand reduction*). Adapun program-program yang termasuk dalam upaya *demand reduction* tersebut dilakukan dalam dua bentuk komunikasi yakni komunikasi interpersonal (tatap muka) dan komunikasi melalui media.

Selanjutnya berkaitan dengan pelaksanaan evaluasi yang dilakukan oleh BNNP DIY, dapat dilihat bahwa pada dasarnya evaluasi tersebut kurang mendalam. Hal ini dikarenakan proses evaluasi yang dilakukan lebih banyak dilakukan oleh BNN Pusat. BNNP DIY disini mengakui hanya sebagai instansi pelaksana. *Outcome* yang dihasilkan dari pelaksanaan evaluasi pun berupa hasil realisasi serta persentase capaian target dari kegiatan yang dilakukan. Akan tetapi, evaluasi tersebut tidak melihat secara lebih mendalam dampak dari kegiatan yang dilakukan terhadap audiens. Pada akhirnya, pelaksanaan evaluasi yang kurang mendalam ini tentunya dapat menyulitkan BNNP DIY untuk mengukur seberapa jauh keberhasilan ataupun kegagalan dari berbagai program dan kegiatan yang dilakukan.

Dari penjelasan tersebut, dapat dilihat bahwa pengelolaan program P4GN sebagai bagian dari strategi komunikasi yang dilakukan oleh BNNP DIY sudah sesuai dengan acuan yang telah ditetapkan BNN Pusat. Dalam hal ini, adanya acuan tersebut memberikan dampak positif serta dampak negatif tersendiri bagi BNNP DIY, khususnya yang terkait dengan penerapan strategi komunikasi di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Di satu sisi, adanya acuan dari BNN Pusat tersebut tentunya memudahkan BNNP DIY sebagai organisasi untuk melakukan perencanaan karena telah memiliki pedoman yang jelas. Di sisi lain, adanya acuan tersebut menyebabkan proses perencanaan yang dilakukan oleh BNNP DIY memiliki beberapa kelemahan seperti penggunaan data dalam proses *research* yang kurang spesifik dan pelaksanaan evaluasi yang kurang mendalam.

Adanya kelemahan dalam hal perencanaan ini disebabkan oleh sistem perencanaan di BNNP DIY yang memang diharuskan mengacu pada acuan yang telah ditetapkan oleh BNN Pusat. Sebagai instansi vertikal dari BNN Pusat, maka dalam melaksanakan berbagai tugas dan fungsinya pun BNNP DIY memang harus mengikuti acuan tersebut. Selain itu, sebagai instansi vertikal, BNNP DIY juga tentunya memiliki sumber daya serta sarana dan prasarana yang terbatas. Sehingga, sangat sulit bagi BNNP DIY sebagai sebuah organisasi untuk dapat berkembang dan merancang strategi diluar acuan yang sudah ditetapkan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan penarikan kesimpulan yang telah peneliti lakukan, terdapat beberapa saran yang dapat peneliti berikan kepada pihak BNNP DIY. Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, dapat dilihat bahwa posisi BNNP DIY sebagai instansi vertikal dari BNN Pusat menyebabkan sulitnya BNNP DIY untuk memiliki otoritas dalam merencanakan dan mengembangkan kegiatan dan programnya secara mandiri. Sehingga, saran yang dapat peneliti berikan akan lebih menitikberatkan pada tahapan implementasi dari strategi yang dilakukan oleh BNNP DIY.

Dalam hal perencanaan sendiri, saran yang dapat peneliti berikan ditujukan pada Bidang-Bidang di BNNP DIY yang bertugas sebagai pelaksana program dan kegiatan agar dapat melakukan penyusunan timeline kegiatan sejak awal dimulainya tahun anggaran baru. Hal ini dapat dilakukan sesegera mungkin setelah Renja BNNP DIY telah selesai disusun oleh Subbagian Perencanaan. Diharapkan dengan adanya penyusunan timeline yang lebih dini ini nantinya dapat membantu memudahkan koordinasi serta kerja sama dengan pihak terkait dalam mengimplementasikan program dan kegiatan yang telah dirancang, serta meminimalisir benturan antara kegiatan dalam satu bidang dengan bidang lainnya.

Berkaitan dengan implementasi, akan lebih baik apabila BNNP DIY dapat mempertahankan program yang dianggap sudah efektif seperti pembentukan dan pelatihan kader, diseminasi informasi dan komunikasi informasi dan edukasi. Kegiatan diseminasi informasi sendiri merupakan salah satu kegiatan

yang cukup baik untuk mencoba memahami secara lebih mendalam kondisi permasalahan narkoba beserta penanganannya yang terjadi di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Hal ini dikarenakan dalam kegiatan yang berlangsung, BNNP DIY berupaya untuk mendapatkan input berupa pendapat dan saran dari para pelajar dan mahasiswa terkait dengan permasalahan tersebut. Diharapkan, hasil dari diseminasi informasi yang dilakukan ini dapat dijadikan sebagai data tambahan yang lebih spesifik di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, sekaligus sebagai bahan pertimbangan untuk melakukan perencanaan di tahun-tahun selanjutnya.

Sedangkan dalam hal evaluasi, akan lebih baik apabila BNNP DIY berupaya untuk melakukan evaluasi terhadap tiap kegiatan yang dilakukan. Hal ini tentunya bertujuan untuk melihat sejauh mana kegiatan yang telah dilakukan memberikan dampak terhadap sasaran audiens. Sehingga, hasil evaluasi tersebut dapat dijadikan bahan pertimbangan tambahan untuk melakukan perencanaan kegiatan di tahun-tahun berikutnya.